

Jantra

Jurnal Sejarah dan Budaya

Kota dan Pengembangan Wilayah

- » Gemeente Pasuruan 1918-1942
- » Gianyar Kota Budaya : Dari Kota Keraton Sampai Kota Seni, 1771 - 1980-an
- » Dari Kampung Desa Ke Kampung Kota:
Perubahan Ekologi Kota Surabaya Dalam Perspektif Permukiman Pada Masa Kolonial
- » Batu Malang: Dari Kota Perkebunan Ke Kota Agrowisata
- » Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh, Kembang Dan Pudarnya Pelabuhan Tuban
- » Konflik Antarkomunitas Etnis Dan Representasi Identitas Etnis Di Sampit, Kalimantan Tengah
- » Diskursus Cacah Dalam Pengelolaan Agraria Keraton Yogyakarta Abad Ke 18-19
- » Permukiman Kota Dan Masalahnya Kasus Kota Yogyakarta

Jantra	Vol. V	No. 10	Hal. 819- 934	Yogyakarta Desember 2010	ISSN 1907 - 9605
---------------	---------------	---------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Terakreditasi B, Nomor : 152/Akred-LIPI/P2MBI/03/2009



Jantra dapat diartikan sebagai roda berputar, yang bersifat dinamis, seperti halnya kehidupan manusia yang selalu bergerak menuju ke arah kemajuan. Jurnal **Jantra** merupakan wadah penyebarluasan tentang dinamika kehidupan manusia dari aspek sejarah dan budaya. Artikel dalam Jurnal **Jantra** bisa berupa hasil penelitian, tanggapan, opini, maupun ide atau pemikiran penulis. Artikel dalam **Jantra** maksimal 20 halaman kuarto, dengan huruf *Times New Romans*, font 12, spasi 2, disertai catatan kaki dan menggunakan bahasa populer namun tidak mengabaikan segi keilmiahannya. Dewan Redaksi **Jantra** berhak mengubah kalimat dan format penulisan, tanpa mengurangi maksud dan isi artikel. Tulisan artikel disampaikan dalam bentuk *file Microsoft Word* (disket, CD), dialamatkan kepada: Dewan Redaksi **Jantra**, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Jalan Brigjen Katamso 139 (nDalem Joyodipuran), Yogyakarta 55152, Telp. (0274) 373241 Fax. (0274) 381555 E-mail: jantra@bpsnt-jogja.info.

Pelindung	Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Penanggung Jawab	Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta
Penyunting Ahli	Prof. Dr. Djoko Suryo Prof. Dr. Suhartono Wiryopranoto Dr. Lono Lastoro Simatupang Dr. Y. Argo Twikromo
Pemimpin Redaksi	Dra. Sri Retna Astuti
Sekretaris Redaksi	Dra. Titi Mumfangati
Anggota Dewan Redaksi	Suhatno, BA. Drs. Darto Harnoko Dra. Endah Susilantini Dra. Siti Munawaroh
Distribusi	Drs. Sumardi
Dokumentasi/Perwajahan	Wahjudi Pantja Sunjata

Alamat Redaksi :

BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA
Jalan Brigjen Katamso 139 (nDalem Joyodipuran), Yogyakarta 55152
Telp. (0274) 373241 Fax. (0274) 381555
E-mail: jantra@bpsnt-jogja.info
Website: <http://www.bpsnt-jogja.info>

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanNya **Jantra** Volume V, No. 10 Desember 2010 dapat hadir kembali di hadapan pembaca. Edisi **Jantra** kali ini memuat 8 (delapan) artikel di bawah tema Kota dan Pengembangan Wilayah. Ke delapan artikel ini masing-masing : 1). *Gemeente Pasuruan 1918-1942* yang ditulis oleh Dwi Ratna Nurhajarini menguraikan tentang permasalahan yang krusial pada waktu itu, apakah yang dilakukan pemerintah kolonial setelah Pasuruan mendapat status sebagai sebuah *Gemeente*; 2). A.A. Bagus Wirawan menulis tentang Gianyar Kota Budaya : Dari Kota Keraton Sampai Kota Seni, 1771 - 1980-an. Ia menguraikan secara historis perkembangan Gianyar sejak kemunculannya hingga saat ini sebagai pusat seniman berkarya dan menjadi sebutan kota seni; 3). Purnawan Basundoro menulis tentang Dari Kampung Desa Ke Kampung Kota : Perubahan Ekologi Kota Surabaya Dalam Perspektif Permukiman Pada Masa Kolonial, yang menguraikan tentang embrio Kota Surabaya yang ada di kawasan pedesaan agraris di tepi pantai, namun seiring dengan kedatangan orang-orang Eropa kawasan tersebut berubah menjadi kawasan kota; 4). Batu Malang: Dari Kota Perkebunan Ke Kota Agrowisata tulisan Retna Astuti menguraikan tentang perkembangan Kota Batu yang semula merupakan kota perkebunan, dengan adanya otonomi daerah Kota Batu berkembang menjadi satu Kota Agrowisata yang cukup potensial bagi kemajuan pariwisata; 5). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh, Kembang Dan Pudarnya Pelabuhan Tuban, ditulis oleh Taryati, membicarakan tentang pelabuhan Tuban sejak awal hingga masa kejayaannya sebagai pelabuhan dagang. Namun adanya faktor geografis maka pelabuhan Tuban dipindahkan kelain tempat sehingga pelabuhan Tuban mengalami kemunduran; 6). Bambang H. Suta Purwana menguraikan tentang konflik antar komunitas etnis di Sampit, Kalimantan Tengah oleh elit masyarakat lokal dimanfaatkan sebagai wahana representasi dan sekaligus penguatan identitas etnis Dayak untuk merebut kembali martabat mereka sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi Dayak yang berdaulat di tanah leluhurnya. Uraian ini diberi judul Konflik Antar komunitas Etnis Dan Representasi Identitas Etnis Di Sampit, Kalimantan Tengah; 7). Ivanovich Agusta menulis tentang Diskursus Cacah Dalam Pengelolaan Agraria Keraton Yogyakarta Abad Ke 18-19. Disini diuraikan tentang cacah yang merupakan bagian dari rakyat yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak melalui tenaga kerja. Diskursus Cacah memungkinkan alokasi surplus sumberdaya dari lapisan sosial rendah kepada elite dan sebaliknya dapat mengembangkan solidaritas cacah dengan elitnya; 8). Permukiman Kota Dan Masalahnya Kasus Kota Yogyakarta, yang ditulis oleh Sukari menguraikan tentang permasalahan perkotaan yang terjadi saat ini terutama adanya konversi lahan pertanian menjadi permukiman, sehingga perkembangan Kota Yogyakarta bergerak ke daerah pinggiran.

Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para mitra bestari yang telah bekerja keras membantu kami dalam penyempurnaan tulisan dari para penulis naskah sehingga **Jantra** edisi kali ini bisa terbit.

Selamat membaca.

Redaksi

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<i>Pengantar Redaksi</i>	ii
<i>Daftar Isi</i>	iii
<i>Gemeente Pasuruan 1918-1942</i>	819
Dwi Ratna Nurhajarini	
<i>Gianyar Kota Budaya :</i>	831
<i>Dari Kota Keraton Sampai Kota Seni, 1771 - 1980-an</i>	
A.A. Bagus Wirawan	
<i>Dari Kampung Desa Ke Kampung Kota:</i>	845
<i>Perubahan Ekologi Kota Surabaya Dalam Perspektif Permukiman</i>	
<i>Pada Masa Kolonial</i>	
Purnawan Basundoro	
<i>Batu Malang: Dari Kota Perkebunan Ke Kota Agrowisata</i>	862
Retna Astuti	
<i>Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh, Kembang Dan Pudarnya</i>	870
<i>Pelabuhan Tuban</i>	
Taryati	
<i>Konflik Antarkomunitas Etnis Dan Representasi Identitas Etnis</i>	883
<i>Di Sampit, Kalimantan Tengah</i>	
Bambang H. Suta Purwana	
<i>Diskursus Cacah Dalam Pengelolaan Agraria Keraton Yogyakarta</i>	897
<i>Abad Ke 18-19</i>	
Ivanovich Agusta	
<i>Permukiman Kota Dan Masalahnya Kasus Kota Yogyakarta</i>	920
Sukari	
<i>Biodata Penulis</i>	931

BIODATA PENULIS

DWI RATNA NURHAJARINI, lahir di Yogyakarta 1966, sarjana Sejarah UGM, memperoleh gelar Magister Humaniora Ilmu Sejarah UGM tahun 2003. Sebagai Staf Peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, aktif melakukan penelitian kesejarahan serta duduk sebagai sekretaris I di dalam organisasi profesi kesejarahan Masyarakat Sejarahwan Indonesia (MSI) cabang Yogyakarta tahun 2006 – 2010. Hasil karya yang telah diterbitkan antara lain: *ORI, Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa (1946–1950)*; *Sanering Uang Tahun 1950: Studi Kasus “Gunting Syafrudin” Akibatnya dalam Bidang Sosial Ekonomi di Indonesia (1997/1998)*; *Peranan Masyarakat Sumbertirto Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan 1948 – 1949 (1998/1999)*; *Pertanian dan Ekonomi Petani: Studi Ekonomi Pedesaan di Yogyakarta 1920-1935 (1999/2000)*; *Dinamika Industri Batik Pekalongan 1930 -1970 (2001)*; *Diversifikasi Pakaian Perempuan: Studi Tentang Perubahan Sosial di Yogyakarta 1940 – 1950 (2002)*; *Batik Belanda: Wanita Indo Belanda dan Bisnis “Malam” di Pekalongan 1900 – 1942 (2003)*; *Petani Versus Perkebunan Pada Masa Reorganisasi Agraria: Studi Kasus di Klaten (2004)*.

A. A. BAGUS WIRAWAN, lahir di Denpasar, Bali pada tahun 1948. Memperoleh gelar S1 dalam ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Sarjana Utama/SU (S2) ilmu Sejarah diperolehnya di Universitas Gadjah Mada, dan gelar doctor (S3) pada ilmu yang sama diperolehnya pada Agustus 2008. Saat ini menjadi Guru Besar Bidang Sejarah Indonesia di Jurusan Sejarah Fak. Sastra Univ. Udayana Denpasar, dengan pangkat Lektor Kepala Bidang Sejarah. Sebagai seorang dosen aktif mengikuti seminar dan diskusi di tingkat lokal maupun nasional, baik sebagai peserta maupun sebagai pemakalah. Di samping itu aktif menulis di surat kabar maupun jurnal, dan tulisan-tulisannya tentang kesejarahan dan kebudayaan banyak yang sudah diterbitkan.

PURNAWAN BASUNDORO, S.S., M.Hum., adalah staf pengajar pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya. Saat ini Kandidat Doktor di Universitas Gadjah Mada, dan sedang menyelesaikan disertasinya yang berjudul "Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang di Kota Surabaya 1900-1960-an". Aktif melakukan penelitian dengan tema sejarah perkotaan. Dapat dihubungi di: pbasundoro@yahoo.com.

RETNA ASTUTI, lahir di Yogyakarta pada tahun 1953, sarjana sejarah pada Fakultas Sastra UGM tahun 1981. Pada tahun 1983 – 1986 bekerja pada Proyek Javanologi Balitbang Dikbud di Yogyakarta. Tahun 1987 menjadi PNS di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, sebagai staf peneliti. Menjadi pengurus harian organisasi profesi Masyarakat Sejarahwan Indonesia (MSI) periode 2001 – 2006 dan 2006 – 2010. Sebagai peneliti sering mengikuti diskusi atau pun seminar kesejarahan dan kebudayaan. Hasil karyanya antara lain: *Peranan Dapur Umum Pada Masa Revolusi 1949 – 1950: Sebuah Studi Awal*; *Organisasi Wanita Tamansiswa Dan Paham Kebangsaan*; *Peranan SWK – 105 di Gunung Kidul*;

Transportasi Darat Dari Masa ke Masa; Kereta Api Ambarawa: Suatu Kajian Sejarah Sosial Ekonomi; Industri Mete di Gunung Kidul; Kajian Serat Witaradya; Kajian Serat Sakeber dan lain sebagainya.

TARYATI, lahir di Kebumen 31 Agustus 1950, Sarjana Geografi IKIP tahun 1978. Sejak tahun 1979 mengabdikan diri sebagai PNS, staf peneliti di Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Jakarta. Tahun 1980 pindah ke Yogyakarta menjadi staf Peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian, diskusi, maupun seminar kesejarahan dan kebudayaan. Tahun 1987 menjabat sebagai Kasi Dokumentasi dan Perpustakaan, tahun 2000 - 2006 menjabat Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Tahun 2006 hingga saat ini menjadi peneliti madya. Hasil karya yang telah dipublikasikan antara lain: *Budaya Masyarakat di Lingkungan Kawasan Industri (Kasus: Desa Donoharjo Ngaglik Sleman); Keberadaan Paguyuban dan Etnis di Daerah Perantauan Dalam Menyongsong Persatuan dan Kesatuan (Kasus Paguyuban Keluarga Putra Bali) di Yogyakarta; Persepsi Masyarakat Terhadap Program Transmigrasi (Studi Kasus RW 04 Dusun Sidomulya, Bener, Tegalreja, Kodya Yogyakarta); Implikasi TKW Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Budaya Rumah Tangga di Kecamatan Dolopo Madiun Jatim; Kabupaten Semarang Dalam Perjalanan Sejarah; Penggalan dan Kajian Cerita Rakyat di Kabupaten Blora; Sejarah dan Budaya Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Blora; Pandangan Masyarakat Terhadap Upacara Perlon Unggahan di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas; Sistem Pengetahuan Masyarakat Pulau Bawean Terhadap Hutan Bakau.*

BAMBANG H. SUTA PURWANA, lahir di Kulon Progo 20 Juli 1961, menyelesaikan pendidikan S1 Antropologi dan S2 Program Studi Sosiologi di Universitas Gadjah mada. Saat ini bekerja sebagai staf peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sebelumnya, selama 9 tahun bekerja sebagai staf peneliti pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak. Tahun 2003, dengan dukungan program Adikarya IKAPI, pernah menulis buku yang berjudul *Konflik Antarkomunitas Etnis di Sambas, 1999: Suatu Tinjauan Sosial Budaya.*

IVANOVICH AGUSTA, lahir tanggal 16 Agustus 1970 di Kudus, Jawa Tengah. Memperoleh gelar S1 Sarjana Pertanian pada tahun 1993 dari IPB, tahun 1997 memperoleh gelar Master Sains (MSi) dari IPB yang kesemuanya diperolehnya dengan cumlaude. Sejak tahun 1997 menjadi dosen Program Sarjana (S1) di IPB, Bogor dan sejak tahun 2000 menjadi dosen Program Pascasarjana (S2), di IPB, Bogor. Pernah pula menjadi staf ahli sebagai Pekerja membangun dalam Majalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selain menjadi dosen, juga banyak melakukan penelitian-penelitian di berbagai bidang bekerjasama dengan departemen-departemen seperti PU, BKKBN, Diperindag, Deptan, Bapenas maupun dengan perusahaan BUMN (PTPN X, BRI), dan lain-lain. Selain melakukan penelitian juga aktif menulis artikel yang dimuat di koran-koran lokal maupun nasional (Kompas,

Suara Merdeka, Pikiran Rakyat), majalah (Basis), dan jurnal (Jantra, Journal of Asia and Pacific Studies, Wacana, Sodality, dsb). Buku-buku hasil penelitian yang telah diterbitkan antara lain: Jejak-Jejak Kesejahteraan: Evaluasi Benefit Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal yang diterbitkan oleh Binasiamindo; Agribisnis Berbasis Komunitas: Sinergi Modal Ekonomi dan Modal Sosial (Penerbit: Pustaka Wirausaha Muda); Sosiologi Industri: Landasan Analisis Agribisnis diterbitkan oleh Program Diploma Manajemen Agribisnis, IPB; Sosiologi Umum (Penerbit: Dokis); Wanita Bersama Pria: Bibliografi Pudjiwati Sayogyo (Dokis); Cara Mudah Menggunakan Metodologi Kualitatif Pada Sosiologi Pedesaan (Dokis), dan lain-lain.

SUKARI, lahir pada tanggal 5 Juli 1960 di Pati, Jawa Tengah. Sarjana Geografi UGM, Jurusan Geografi Manusia, lulus tahun 1986. Sejak Tahun 1988 mengabdikan sebagai PNS di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta dan saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya. Tahun 1986 menjadi Asisten peneliti di Litbang UMY, dan pada tahun yang sama sebagai Tenaga Ahli Demografi untuk Perencanaan Kota di PT. Mirash Konsultan. Pada tahun 1991 pernah mengikuti Pelatihan Metodologi Penelitian yang diselenggarakan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bekerjasama dengan LPIST (Lembaga Pengembangan Ilmu Sosial Transformatif). Aktif mengikuti kegiatan ilmiah seperti seminar dan diskusi yang berhubungan dengan kesejarahan dan kebudayaan. Hasil karya yang telah dipublikasikan antara lain: *Kehidupan Sosial Ekonomi Budaya Pengodol Kapuk di Desa Karaban, Gabus, Pati Jawa Tengah*; *Peranan Wanita Dalam Rumah Tangga Nelayan di Desa Bendar, Juwana, Pati, Jawa Tengah*; *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Tengger, Pasuruan, Jawa Timur*; *Interaksi Sosial Budaya Antara Sukubangsa Bugis, Makasar dengan Sukubangsa Jawa di Desa Kemujan Kepulauan Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah*; *Peninggalan Sejarah Purbakala Kabupaten Kudus Jawa Tengah*; *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura, Jawa Timur*; *Makam Sunan Muria: Pengaruhnya Terhadap Pariwisata dan Masyarakat Sekitarnya, di Kudus, Jawa Tengah*.

Ralat **Jantra** Vol. V, No. 10, Desember 2010

Tertulis	Seharusnya
Setelah Halaman 915 langsung 920 dst terdapat halaman loncat dalam penulisan	Halaman 915, 916, 917, ... dst

DARI KAMPUNG DESA KE KAMPUNG KOTA: PERUBAHAN EKOLOGI KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PERMUKIMAN PADA MASA KOLONIAL

Purnawan Basundoro¹

Abstrak

Banyak ahli tentang kota berpendapat bahwa sebagian besar kota di dunia berawal dari kawasan pedesaan. Aktifitas manusia yang intensif telah mengubah kawasan tersebut secara berangsur-angsur menjadi kawasan yang ramai dan sibuk yang kemudian disebut sebagai kawasan perkotaan. Dengan demikian maka perubahan itu tidak bisa dipisahkan dengan perubahan ekologi. Perubahan ekologi yang cepat tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kecepatan manusia dalam mengubah kawasan-kawasan tertentu menjadi permukiman. Terbentuknya Kota Surabaya sejalan dengan pendapat para ahli tersebut. Embrio Kota Surabaya adalah kawasan pedesaan agraris di tepi pantai. Kedatangan orang-orang Eropa di kawasan tersebut telah merubah kawasan itu menjadi kawasan kota. Namun pada saat terjadi perubahan radikal dari kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan, sebagian besar masyarakat bumiputra tidak mampu mengikuti perubahan tersebut. Pemukiman bumiputra yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kemudian tetap bertahan menjadi pemukiman yang memiliki budaya masa lampau dan agraris, yang disebut kampung.

Kata Kunci: Surabaya, kampung, ekologi, permukiman

Abstract

Many experts on the city argued that most cities in the world originated from rural areas. Intensive human activities have changed the region gradually became the area's hustle and bustle which is then referred to as the urban area. Thus, changes can not be separated with ecological changes. Rapid ecological changes are one of them is influenced by the speed of humans in changing certain areas into settlements. The formation of the city of Surabaya in line with the opinion of these experts. The origins of the city of Surabaya is a rural area on the beach. The arrival of the Europeans in the region has turned the region into areas of the city. But in times of radical change from rural areas into urban areas, most of the bumiputra community can not afford to follow such changes. bumiputra settlements which are unable to adapt to change and then persist into settlements that have past and agrarian culture, the so-called kampoong.

Key Word: Surabaya, kampoong, ecology, housing

¹ Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Kandidat Doktor di Universitas Gadjah Mada.

A. Pengantar

Banyak teori menerangkan bahwa asal-usul kota berawal dari desa. Artinya, tidak ada satupun kota yang lahir dengan tiba-tiba. Perspektif evolusionis selalu menganggap bahwa kota lahir secara berangsur-angsur dari wilayah pedesaan menjadi wilayah kota. Lewis Mumford salah satu pendukung perspektif evolusionis merumuskan paling tidak ada 6 tahap perkembangan kota mulai dari *eopolis* (kota yang baru berdiri) sampai ke *nekropolis* (kota yang telah menjadi bangkai alias telah runtuh).² Dengan demikian maka kota terbentuk berbarengan dengan proses perubahan ekologi, dari ekologi pedesaan ke ekologi perkotaan. Tulisan di bawah ini akan menguraikan dampak dari perubahan ekologi terhadap formasi permukiman di Kota Surabaya beserta dinamika sosial yang mengiringinya.

B. Surabaya pada Periode Awal

Sampai saat ini tidak ada satupun bukti tertulis -baik dalam bentuk prasasti, inskripsi, atau bukti tertulis lainnya- yang menerangkan tentang asal-usul Kota Surabaya. Salah satu cerita rakyat yang dianggap sebagai legenda dari lahirnya Kota Surabaya adalah cerita perkelahian antara ikan *Suro* dan binatang buaya (*Boyo*) yang melahirkan nama *Suroboyo* (Surabaya). Legenda biasanya lahir dari masyarakat pedesaan ketika mereka tidak mampu mengurai kenyataan yang dihadapi dengan akal yang mereka miliki. Walaupun terdapat legenda yang lahir di kota (*urban*

legend), namun cerita tentang ikan *Suro* dan *Boyo* adalah legenda yang lahir dari masyarakat pedesaan (*rural legend*). Legenda itu menjadi salah satu bukti bahwa asal mula Kota Surabaya adalah desa di tepi pantai.³ Sebuah keputusan resmi Walikota Surabaya Nomor 64/WK/75 tanggal 18 Maret 1975 menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai hari kelahiran Kota Surabaya. Tanggal tersebut dikaitkan dengan kemenangan Raden Wijaya ketika menghadapi Pasukan Tartar, yang dipercaya terjadi di sebuah desa pantai yang saat ini berkembang menjadi Kota Surabaya.⁴

Pantai Surabaya dan Sungai Kali Mas merupakan faktor utama yang menjadi pendorong berkembangnya wilayah ini menjadi sebuah kota. Hal ini sesuai dengan teori *break in transportation* seperti yang dirumuskan oleh Charles H. Cooley yang menyebutkan bahwa tempat-tempat terjadinya pergantian moda transportasi memiliki kecenderungan paling besar untuk tumbuh menjadi kota, karena di tempat-tempat itulah akan berkumpul massa yang cukup besar yang mampu memancing terbentuknya aglomerasi.⁵ Sebuah peta kuno yang dibuat tahun 1677 oleh VOC dalam rangka persiapan pasukan Cornelis Speelman yang akan menyerang Surabaya untuk menaklukkan Trunojoyo memperlihatkan bahwa hampir seluruh aktifitas di kota ini terpusat di sepanjang muara Sungai Kali Mas. Peta tersebut memperlihatkan rumah-rumah dibangun berderet-deret di

² Perspektif evolusionis dari Lewis Mumford mengatakan bahwa kota berkembang dari *eopolis* (kota yang baru berdiri), *polis* (kota), *metropolis* (kota besar), *megalopolis* (kota yang sudah amat besar), *tyranopolis* (kota yang sudah ekspansif dan kejam), serta *nekropolis* (kota mayat, kota yang telah runtuh). Lewis Mumford, *The Culture of Cities*, (New York: Harcourt Brace: 1938)

³ James Danandjaja, *Folklore Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*, (Jakarta: Grafitipers, 1986), hal. 66-83

⁴ Subbag Humas dan Protokol Kotamadya Surabaya, *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*, (Surabaya: Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya, 1980), hal. 19

⁵ Purnawan Basundoro, "Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-1940," *Tesis Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada* 1999, hal. 27

kanan dan kiri muara sungai serta masuk satu atau dua kilometer ke daratan. Jika dibandingkan dengan peta yang dibuat belakangan, maka peta tahun 1677 tersebut memperlihatkan bahwa batas paling selatan Kota Surabaya pada waktu itu masih di sekitar alun-alun yang pada masa kolonial terkenal dengan sebutan *Kebon Raja*. Di bagian-bagian belakang terlihat tanah-tanah kosong yang dibelah oleh banyak aliran sungai. Selain sebagai sumber kehidupan nampaknya aliran Sungai Kali Mas juga menjadi media yang efektif untuk transportasi penduduk setempat, baik untuk menuju ke wilayah pedalaman maupun untuk menuju ke dunia luar melalui lautan bebas.⁶

Peta tersebut juga memperlihatkan hubungan darat yang masih polos antara kota ini dengan kawasan darat lainnya. Hubungan Surabaya-Gresik yang merupakan kota terdekat juga masih sangat terbatas. Bahkan peta tersebut tidak memperlihatkan gambar jalan ke luar daerah. Berdasarkan kesaksian van Imhoff setibanya di Surabaya pada tahun 1746, hubungan antara Surabaya dengan Gresik masih amat sulit. Keinginan dia untuk pergi ke Gresik melalui jalan darat akhirnya dibatalkan dengan alasan jalan menuju ke kota itu amat tidak memadai. Satu-satunya cara adalah dengan berjalan kaki melalui pematang-pematang sawah, sehingga diperlukan waktu enam sampai tujuh jam untuk menempuh jarak yang tidak sampai 30 kilometer.⁷ Kisah rencana perjalanan van Imhoff tersebut telah menunjukkan bahwa di luar kawasan pemukiman yang

mengular mengikuti aliran sungai adalah kawasan pertanian, yaitu sawah, ladang, yang bercampur dengan tanah-tanah kosong yang ditumbuhi semak-semak dan tumbuhan bambu. Foto-foto yang dibuat belakangan juga memperlihatkan pohon-pohon yang terlihat amat rindang dan besar-besar yang menunjukkan bahwa kawasan itu sebelumnya adalah hutan yang ditumbuhi tanaman keras.

Kedatangan orang-orang Eropa (Belanda) ke Surabaya pada perkembangan selanjutnya berhasil mempertegas titik-titik tertentu di kota tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Sebelum kedatangan mereka sebenarnya telah ada beberapa titik pertumbuhan, seperti pusat keagamaan di sekitar masjid Ampel yang telah berkembang sejak abad ke-15 bersamaan dengan lahirnya kegiatan penyiaran Islam oleh Sunan Ampel. Sebagaimana dikemukakan oleh Denys Lombard, Sunan Ampel atau Raden Rahmat sebenarnya berhasil mengembangkan kawasan Ngampel Denta sebagai kawasan niaga, namun kemunculan kerajaan pedalaman yang bersifat agraris yaitu Mataram telah merontokkan peran Surabaya sebagai kota dagang.⁸ Dengan menurunnya peran Surabaya sebagai kota dagang maka melambat pula proses peng-kota-an wilayah tersebut.

Titik-titik yang dikembangkan oleh pendatang Eropa itulah, yang dalam konteks teori inti berganda (*multiple nuclei theory*) yang dikembangkan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945, menjadi inti perkembangan Kota

⁶ G.H. Von Faber, *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's eerste Koopstad van de Oudste tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad (1906)*, (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1931), hal. 11

⁷ *Ibid.*

⁸ Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 57).

Surabaya.⁹ Kawasan pemukiman bisa dijadikan petunjuk awal untuk melihat proses perkembangan titik-titik tertentu sebagai inti perkembangan. Sebuah kawasan pemukiman biasanya lebih potensial untuk berkembang menjadi kawasan yang lebih ramai dibandingkan dengan kawasan kosong yang baru saja dibuka. Menurut J. Hageman sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Surabaya, pola pemukiman yang sudah terbentuk di kota ini berdasarkan atas pengelompokan etnis, yaitu etnis Cina, etnis Melayu, dan masyarakat bumiputera setempat.¹⁰ Hageman menggambarkan bahwa pemukiman etnis Cina menggerombol menjadi satu, demikian pula pemukiman etnis Melayu, sedangkan perkampungan orang bumiputera letaknya terpencar-pencar di sekitar perkampungan tersebut serta berada di tanah-tanah pertanian mereka.¹¹ Formasi pemukiman di pusat Kota Surabaya bertambah satu lagi ketika para pedagang dari Eropa mulai menetap di kota ini. Menurut Von Faber para pedagang dari Portugis lebih dulu “menemukan” Surabaya dibandingkan dengan para pedagang Belanda. Ketika Hendrik Brouwer, seorang pedagang dari Belanda, mengunjungi pantai

Surabaya yang pertama kalinya pada tahun 1612 ia menjumpai banyak pedagang dari Portugis sedang membeli rempah-rempah dari penduduk setempat.¹²

C. Pemukiman sebagai Inti Perubahan

Menguatnya eksistensi para pendatang dari Eropa di Kota Surabaya mulai terjadi ketika pada tahun 1617, Jan Pieterzon Coen mendirikan loji (*loge*) di kota ini. Loji tersebut telah menjadi simbol bahwa Kota Surabaya pada titik tertentu telah berada di bawah kekuasaan bangsa Eropa. Loji tersebut menjadi modal bagi para pendatang Eropa untuk mengembangkan kota ini menjadi basis yang strategis untuk melakukan ekspansi ekonomi dan politik. Pada periode awal ini loji menjadi orientasi utama pemukiman Eropa di Kota Surabaya, artinya rumah-rumah yang dibangun untuk tempat hunian berada di sekeliling loji. Namun demikian, pada periode awal ini pemukiman Eropa belum menjadi titik strategis untuk inti perkembangan. Bahkan pada peta yang dibuat oleh VOC tahun 1677 sebagaimana disebutkan di atas, bangunan-bangunan penting di kota ini di luar pemukiman Eropa merupakan

⁹ Teori inti berganda (*multiple nuclei theory*) yang dikembangkan oleh C.D. Harris dan F.L. Ullman mengatakan bahwa kebanyakan kota besar tidak tumbuh dalam ekspresi ruang yang sederhana yang hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja (*uncentered theory*) namun terbentuk sebagai suatu produk perkembangan dan integrasi yang berlanjut terus-menerus dari sejumlah pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain dalam suatu sistem perkotaan (*multi centered theory*). Pusat-pusat ini dan distrik-distrik di sekitarnya di dalam proses pertumbuhan selanjutnya kemudian ditandai oleh gejala spesialisasi dan deferensiasi ruang. C.D. Harris dan F.L. Ullman, “The Nature of Cities,” dalam *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Volume 242, 1945

¹⁰ Tidak ada keterangan yang pasti kapan kelompok etnis Cina mulai tinggal di Kota Surabaya. Menurut Claudine Salmon mereka sudah sejak berabad-abad yang lalu tinggal di Kota Surabaya dan aktif sebagai pelaku bisnis di kota bandar ini. Claudine Salmon, “The Han Family of East Java: Entrepreneurship and Politics (18th 19th Centuries),” *Archipel* 41, 1991, hal. 53.

¹¹ J. Hageman, *Oostelijk Java en Madoera*, II prgf. 108

¹² Menurut Von Faber orang Portugis yang pertama kali mengunjungi Jawa bagian timur adalah Antonio de Abreu yang dikirim oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. ia mengunjungi pelabuhan Gresik yang pada waktu itu memiliki posisi lebih strategis dibandingkan pelabuhan Surabaya. Sekitar sepuluh tahun kemudian singgah pula beberapa kapal Portugis yang dipimpin oleh Antonio de Brito yang sempat tinggal beberapa bulan di Gresik karena cuaca sangat buruk. Cornelius Houtman seorang pelaut Belanda berhasil mendaratkan kapalnya di Sedayu, Gresik pada tahun 1596 dan pada tahun 1598 Jacob van Heemskerck dari Belanda juga mendarat di Gresik. Keterangan ini menguatkan dugaan bahwa pada periode awal Surabaya belum menjadi bandar yang penting bila dibandingkan dengan Tuban, Gresik, atau Sedayu. G.H. von Faber, *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indies Eerste Koopstad van de Oudste Tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad* (1906), (Surabaya: Gemeente Soerabaia, 1931), bab 2

bangunan milik penguasa pribumi. Bangunan penting yang paling menonjol adalah kawasan masjid dan makam di Ampel yang terletak di sebelah timur Sungai Kali Mas, kompleks *paseban* lama Pangeran Trunajaya yang dikelilingi oleh dinding, dan kompleks *paseban* baru Pangeran Trunajaya yang terletak di barat Sungai Kali Mas. Beberapa kampung yang disebut-sebut dalam peta tersebut antara lain kampung Kaliwatu (*Caliwato*), Kalisosok (*Calisosok*), Kalianak (*Calianak*), serta Cregis (?). Sedangkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Speelman menempati sebuah titik di muara Sungai Kali Mas di tepi timur.¹³ Pada titik inilah Belanda kemudian membangun benteng yang diberi nama Prins Hendrik yang berada pada wilayah yang diapit antara Sungai Kali Mas dengan Sungai Pegirian.

Pada waktu itu Sungai Kali Mas adalah orientasi utama perkembangan Kota Surabaya. Sungai itu mulai dari muara sampai ke kawasan yang kemudian disebut Jembatan Merah dapat dilayari perahu-perahu yang membawa barang dagangan. Dengan demikian maka Sungai Kali Mas merupakan pintu masuk ke Kota Surabaya dari arah laut. Muara sungai ini menjadi pelabuhan penting yang disebut pelabuhan Kali Mas. Kapal-kapal yang menghubungkan Kota Surabaya dengan daerah-daerah lain di luar pulau bersandar di pelabuhan Kali Mas. Letak pelabuhan ini berada di sisi barat benteng Prins Hendrik. Pemanfaatan Sungai Kali Mas sebagai jalur transportasi sungai, walaupun untuk jarak yang tidak terlalu jauh, telah mendorong proses terbentuknya

aglomerasi di kedua tepinya yaitu di tepi barat dan tepi timur. Kawasan Pecinan yang berada di sisi timur Sungai Kali Mas bisa dikatakan merupakan aglomerasi yang cukup penting yang berada di tepi sungai. Beberapa penelitian memang menyebutkan bahwa munculnya pemukiman etnis Cina (Pecinan) yang menggerombol menjadi satu merupakan rekayasa pemerintah kolonial Belanda. Namun jika kita melihat aspek psikologis dari terbentuknya kawasan pemukiman para pendatang, maka kebijakan pemerintah kolonial tersebut nampaknya kebijakan yang diberlakukan setelah pemukiman etnis Cina tersebut terbentuk.¹⁴

Secara psikologis para pendatang biasanya akan merasa aman jika tinggal dalam satu pemukiman. Para pendatang awal yang menetap di Kota Surabaya pasti masih menjumpai kawasan ini sebagai kawasan pedesaan yang belum berkembang dengan jumlah penduduk yang masih sangat sedikit. Dalam kondisi seperti itu ancaman terhadap para pendatang cukup besar. Dengan alasan demi keamanan dan solidaritas sesama pendatang mereka menetap dalam satu kawasan. Kebijakan untuk “menutup” pemukiman para pendatang baru diberlakukan kemudian oleh pemerintah kolonial yang juga merasa terancam dengan adanya etnis lain di sekitar mereka. Kebijakan tersebut kemudian menghendaki agar para pendatang asing yang disebut sebagai “orang asing di bawah angin” harus melaporkan diri ke pemerintah. Dengan kewajiban melapor tersebut maka pemerintah memiliki kewenangan untuk menempatkan mereka pada area tertentu

¹³ *Ibid.*, hal. 11

¹⁴ Kebijakan pemerintah kolonial tentang penyatuan pemukiman etnis Cina pada suatu tempat secara rinci dapat dilihat pada J.E. Albrecht, *Soerat Ketrangan dari pada Hal Keadaan bangsa Tjina di Negri Hindia Olanda*, (Batavia: Albrecht & Rusche, 1890)

yang telah ditentukan.¹⁵ Kebijakan ini telah melahirkan kawasan pemukiman berdasarkan etnis yang kemudian dikukuhkan dengan adanya kewenangan berlebihan pada gubernur jenderal yang disebut *exorbitante rechten*.¹⁶ Alasan pemusatan pemukiman berdasarkan kelompok etnis adalah karena penduduk Hindia Belanda sangat heterogen, artinya terdiri dari berbagai macam suku dan golongan etnis, maka untuk menghindari konflik horisontal perlu ditunjuk tempat tinggal tertentu. Dengan kebijakan ini maka terbentuklah di Kota Surabaya kawasan Pecinan (*Chinese Kamp*) yang dihuni para pendatang dari Cina, kawasan Kampung Melayu (*Malaise Kamp*), dan kawasan perkampungan Arab (*Arabische Kamp*).¹⁷ Bunyi salah satu aturan tentang pemusatan pemukiman adalah sebagai berikut:

Menoeroet soerat Staatsblad tahoen 1866 no.57 maka diberi idzin kepada orang-orang asing jang di bawah angin aken doedoek di tempat tempat, di mana soedah ditetapkan kempoeng-kampoeng bagi bangsanja, oleh Sri Padoeka jang di Pertoean Besar. Tempatnja di dalam kampoeng, jang aken didoedoeki, di atoeer oleh kepala pemarentahan negri (Staatsblad tahoen 1871 no.145).¹⁸

Kebijakan pembatasan area pemukiman berdasarkan etnis berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan Kota Surabaya.

Kebijakan tersebut telah menyebabkan orang tidak bebas bergerak ke luar wilayah yang telah ditunjuk. Akibatnya pemukiman menjadi berjejal karena komunitas mereka terus bertambah sebagai akibat jumlah kelahiran yang terus naik serta jumlah pendatang dari etnis sejenis yang naik pula. Hanya orang-orang Eropa sajalah yang memiliki kebebasan untuk berpindah tempat atau mengembangkan wilayah dari satu titik ke titik lain karena merekalah yang memiliki otoritas. Dengan kebijakan semacam itu maka para pemukim Eropa lah yang memiliki peran terbesar dalam mengembangkan luas Kota Surabaya terutama sebelum akhir abad ke-19. Pada awal abad ke-19 kawasan benteng Prins Hendrik sudah menjadi kawasan yang ditinggalkan oleh para pendatang awal Eropa. Pemukiman Eropa sudah menyebar ke segala arah namun berpusat di kawasan Jembatan Merah.

Ketika orang-orang Eropa sudah mulai menetap secara *establish* di Kota Surabaya maka formasi spasial dan formasi sosial sudah semakin jelas. Kedua formasi tersebut sebenarnya menyatu dengan erat. Orang-orang Eropa memposisikan diri di kawasan Jembatan Merah dan menjadikan kawasan tersebut sebagai inti perkembangan kota yang digerakkan oleh aktivitas mereka, yaitu sebagai birokrat, pekerja di sektor swasta, dan sebagai pedagang. Di seberang Jembatan Merah terbentang kawasan Pecinan yang telah memposisikan dirinya sebagai kawasan perdagangan sehingga jalan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 1

¹⁶ *Exorbitante rechten* adalah hak bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menentukan tempat tinggal bagi golongan-golongan penduduk Hindia Belanda atau pribadi tertentu. Hak tersebut dikatakan *exorbitant*, artinya 'khusus-istimewa' karena menurut hukum Barat memang luar biasa dan tidak lazim. Lihat Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hal. 34-35

¹⁷ *Ibid.*, hal. 35

¹⁸ Albrecht, *op.cit.*, hal. 6

utama yang membelah kawasan tersebut disebut *Handelstraat* (Jalan Perdagangan). Pecinan menjadi inti yang lain yang mendorong perkembangan kawasan seberang Sungai Kali Mas. Beberapa pasar yang cukup besar pada akhirnya tumbuh dan berkembang di kawasan ini. Kawasan utara Pecinan, yang oleh orang-orang Eropa dikelompokkan secara etnis sebagai Kawasan Perkampungan Melayu (*Malaise Kamp*) perkembangannya tidak terlalu signifikan dan hanya menjadi kawasan pemukiman biasa. Perkampungan Melayu di Kota Surabaya tidak terlalu istimewa, bahkan tidak memperlihatkan sebagai kawasan yang spesifik. Kawasan yang lain yang justru menjadi perhatian warga Kota Surabaya dari berbagai lapisan masyarakat adalah perkampungan kuno yang berintikan makam keramat, yaitu makam Sunan Ampel. Di sana berdiri masjid besar yang menjadi orientasi utama penganut kepercayaan Islam. Ketika para pendatang Arab mendarat di pelabuhan Surabaya mereka memilih kompleks makam Sunan Ampel ini sebagai pusat pemukiman mereka. Dengan demikian maka kompleks makam dan masjid Sunan Ampel identik dengan pemukiman Arab atau Kampung Arab (*Arabisch Kamp*).

Dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial sebagaimana telah dikutip di atas, pemukiman berdasarkan etnis bisa bertahan. Mereka beranak-pinak di tempat tersebut. Jika anak-anaknya sudah berkeinginan untuk berkeluarga, mereka akan menikahkannya. Setelah menikah tentu saja anak-anak tersebut membutuhkan tempat tersendiri. Maka tanah-tanah mereka sebagian akan disisihkan untuk mendirikan rumah bagi anaknya yang telah berkeluarga tersebut. Proses

semacam itu terus berlanjut, sehingga perkampungan berdasarkan etnis tersebut terus melahirkan rumah-rumah baru yang mengakibatkan kampung menjadi penuh-sesak.

D. Pemukiman Bumiputra

Berbeda dengan perkampungan yang oleh pemerintah kolonial dianggap sebagai kawasan hunian “orang asing di bawah angin” yang cenderung memusat dan mendapatkan aturan ketat untuk tidak meloncati batas, orang-orang bumiputera tinggal di kawasan yang memencar sesuai dengan profesi mereka. Jika mereka adalah seorang petani mereka akan tinggal di dekat ladang-ladang mereka atau sawah-sawah mereka. Jika mereka seorang nelayan maka mereka akan tinggal di tepi pantai atau tinggal di tepi kiri dan kanan Sungai Kali Mas. Demikian pula yang berprofesi di sektor-sektor perkotaan, seperti sebagai buruh atau pemilik usaha, mereka lebih suka tinggal di kampung-kampung di tengah kota. Dengan mendekat kepada area yang menjadi sandaran profesi mereka, maka mereka tidak terlalu memikirkan aspek transportasi. Tidak mungkin seorang petani mampu dan mau berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk bekerja di ladang mereka. Demikian pula, seorang nelayan tidak akan mungkin menambatkan perahu mereka di daratan yang berjarak beberapa ratus meter dari pantai atau sungai. Secara naluriah seorang pekerja akan mendekatkan tempat tinggal mereka dengan tempat pekerjaan mereka. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan tempat bekerja hanya dimungkinkan di tempat-tempat yang sistem transportasinya sudah berkembang dengan baik.

Penduduk bumiputra yang rata-rata berprofesi sebagai petani, nelayan, dan

buruh oleh para pendatang Eropa selalu diidentikkan dengan kemiskinan. Orang Eropa melihat derajat sosial seseorang biasanya dengan melihat tempat tinggal yang bersangkutan. Pandangan semacam ini didasari kepercayaan bahwa dalam kacamata orang Eropa, rumah yang terbuat dari batu bata adalah simbol kemakmuran. Maka hampir dipastikan semua rumah dan bangunan lain yang dibangun oleh orang Eropa sebisa mungkin merupakan rumah batu bata. Demikian pula bangunan yang dibuat oleh orang-orang Cina. Sehingga di Kota Semarang muncul istilah “Gedong Batu” untuk menyebut bangunan klenteng Cina yang memang terbuat dari batu bata. Karena sebagian besar, atau rata-rata rumah yang ditinggali penduduk bumiputera tidak terbuat dari batu bata maka mereka dikategorikan sebagai orang miskin. Rumah-rumah penduduk bumiputera yang rata-rata terbuat dari bahan seadanya seperti tiang-tiangnya yang hanya terbuat dari bambu atau kayu seadanya, dindingnya yang terbuat dari anyaman daun kelapa atau anyaman bambu yang dibelah (*gedhek*), dan beratapkan daun-daunan atau genting tipis dianggap sebagai pemukiman yang dihuni oleh orang-orang miskin. Rumah-rumah semacam itu merupakan hunian sebagian besar penduduk bumiputera Kota Surabaya sejak zaman dahulu kala. Standar-standar baru tentang pemukiman yang sehat, bersih, dan nyaman yang dibuat oleh orang-orang Eropa yang baru tiba dan menetap di Surabaya telah menyebabkan rumah-rumah yang bentuknya dibuat secara sengaja seperti itu telah jatuh nilainya di mata orang-orang Barat.

Pandangan bahwa rumah-rumah penduduk bumiputera rata-rata tidak memenuhi standar hidup yang layak dalam kacamata orang-orang Barat salah satunya dilontarkan oleh N. Van Meeteren Brouwer yang tiba di Kota Surabaya pada tanggal 21 Juni 1825. Dalam catatan hariannya ia mengatakan bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu kota di tepi sungai yang cukup bagus. Jalan-jalannya cukup lebar, rata dan berpagar. Namun pada saat yang bersamaan ia juga menggambarkan kontras kota ini. Ia mengatakan bahwa rumah-rumah kebanyakan terbuat dari bambu yang diberi atap dari *adap* atau ilalang.¹⁹ Model rumah yang seperti itu hampir menyeluruh terdapat di Kota Surabaya. Foto-foto dan lukisan yang dibuat lebih belakangan memperlihatkan secara visual bentuk fisik secara umum rumah-rumah di kota tersebut. Bentuk rumah yang seadanya mengesankan rumah-rumah di daerah pedalaman sebagaimana diekspos secara besar-besaran oleh H.F. Tillema dalam enam jilid bukunya yang amat spektakuler, *Kromoblanda*.²⁰

Heldring yang pernah tinggal di Kota Surabaya pada pertengahan sampai akhir abad ke-19 banyak membuat uraian visual dalam bentuk lukisan tentang kampung-kampung di kota tersebut. Salah satu lukisan yang berangka tahun 1880 memperlihatkan sebuah rumah di bawah kerimbunan rumpun bambu dan di sela-sela pepohonan pisang. Rumah yang terletak di sekitar kawasan Simpang tersebut terlihat *doyong* ke kanan yang menandakan bahwa struktur dasarnya tidak terlalu kuat, bisa jadi karena sambungan antara tiang-tiangnya

¹⁹ *Dagverhaal van eene reis door den Oosthoek van Java in het Jaar 1825 door den heer N. Van Meeteren Brouwer* (tanpa tempat dan tanpa tahun), hal. 15-16

²⁰ H.F. Tillema, *Kromoblanda: Over het Vraagstuk van 'het Wonen' in Kromo's Grote Land*, 6 Jilid, ('s-Gravenhage: Uden Masman, De Atlas dan Adi Peostoko, 1915-23)

dengan struktur atas sudah tidak sempurna lagi atau karena rumah tersebut tidak berpondasi sehingga tiangnya ambles dan lapuk dimakan rayap. Dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu seadanya dan atapnya terbuat dari tumbuhan ilalang bercampur genting tipis.²¹

Ada beberapa hal yang dapat menjelaskan mengapa pemukiman penduduk bumiputera di Kota Surabaya mayoritas sangat mengenaskan dan kurang layak sebagai tempat hunian yang “memenuhi standar.” Pertama, sebagian besar penduduk bumiputera mengalami kemiskinan akut sehingga tidak mampu membangun rumah yang layak. Kedua, sebagian besar penduduk Kota Surabaya pada hakekatnya masih bergulat dengan budaya agraris yang tidak terlalu memperhatikan standarisasi tempat tinggal sehingga ketika masuk standar baru yang dibawa para pendatang dari Eropa akan terjadi kontrasiasi antara kedua tipe pemukiman tersebut. Antara faktor pertama dengan yang kedua sebenarnya memiliki pertalian yang erat, yaitu bahwa kemiskinan akut yang melanda penduduk Kota Surabaya adalah karena mereka mewarisi profesi dan budaya masa lalu, yaitu budaya agraris. Beberapa teori yang membahas kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang selalu mengaitkan kemiskinan dengan budaya agraris.

Ketika Surabaya perlahan-lahan berubah menjadi sebuah kota, pada saat itu berubah pula ekologi di kawasan tersebut. Pada satu sisi terdapat wilayah yang berubah menjadi sebuah kota dengan fungsi-fungsinya, tetapi pada

saat yang bersamaan masih terdapat kawasan yang bertahan dengan keadaan masa lalunya yaitu kawasan dan budaya agraris. Secara fisik kawasan yang amat cepat mengalami perubahan adalah kawasan yang paling dekat dengan jalur-jalur transportasi karena kawasan inilah yang paling cepat mendapat pengaruh dari luar. Surabaya berkembang menjadi sebuah kota terkemuka pada dasarnya karena kota ini memiliki pantai yang bisa disandari kapal, yang pada perkembangannya berubah menjadi pelabuhan dagang, bukan karena fungsinya sebagai pusat pemerintahan tradisional. Walaupun kota ini sering dikaitkan dengan seorang penyebar Islam, Sunan Ampel, tetapi otoritasnya tidak mampu menjadi sebuah faktor penentu berkembangnya Surabaya menjadi sebuah kota karena aktifitas penyebaran Islam tidak melibatkan manusia dalam jumlah massal.²² Banyak ulasan yang menyebutkan bahwa berkembangnya kota-kota pantai di Jawa terkait erat dengan datangnya para pedagang dari luar pulau. Namun berkembangnya kota-kota tersebut menjadi sebuah kota yang tertata dan memiliki zona-zona yang terencana adalah setelah kedatangan orang-orang Eropa terutama bangsa Belanda.

Meskipun Kota Surabaya berkembang menjadi kota dagang sejak zaman dahulu kala, kondisi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi sosial di kota tersebut. Tidak ada satupun sumber sejarah yang mendeskripsikan atau menjadi bukti bahwa perdagangan di kota ini telah memunculkan kelompok-kelompok saudagar terkemuka bumiputera Kota

²¹ Lukisan karya Heldring bertanggal 5 Nopember 1880, www.kitlv.nl.

²² Sebuah daerah bisa berkembang menjadi sebuah kota jika di daerah tersebut bisa memunculkan aktifitas yang bisa mengundang orang dalam jumlah yang cukup banyak, walaupun aktifitas tersebut bukan berbentuk kerumunan. Perdagangan atau aktifitas di pelabuhan dan pusat-pusat dagang lainnya adalah aktifitas yang mampu mengumpulkan orang dalam jumlah yang cukup banyak. Hal inilah yang mendorong proses pengkotaan sebuah wilayah.

Surabaya. Lapisan sosial yang terbentuk ketika para pendatang Eropa sudah mulai *establish* di kota ini justru menempatkan orang-orang Eropa, Cina, Arab, dan India sebagai pedagang. Secara lebih rinci pelapisan berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut, pertama orang-orang Eropa kulit putih sebagian besar adalah pegawai pemerintah, pemegang otoritas di pabrik-pabrik, atau pedagang. Kedua, orang Cina, Arab, dan India sebagian besar adalah pedagang eceran dan tukang meminjamkan uang atau *minding*. Ketiga, masyarakat bumiputera yang bekerja di sektor agraris, nelayan, pengrajin, dan menjadi buruh di sektor-sektor perkotaan.²³

Pelapisan sosial tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan penduduk bumiputera, karena posisi mereka berada pada lapisan yang paling bawah karena sektor pertanian, perikanan, dan sektor perburuan merupakan sektor yang menghasilkan sumber penghidupan yang paling sedikit. Golongan yang bekerja pada sektor agraris menempati posisi terbesar walaupun Kota Surabaya sedang beranjak menuju kota. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Surabaya sebenarnya berada pada tarikan antara dua kutub, yaitu kutub agraris murni yang meliputi pertanian dan perikanan (nelayan) dan kutub sektor perkotaan seperti sektor-sektor industri rumah tangga, buruh-buruh pabrik, dan sektor jasa lainnya. Berdasarkan catatan Hageman yang berangka tahun 1859 menyebutkan bahwa penduduk dewasa yang terserap di sektor pertanian dan perikanan

(tersier) menempati prosentase terbesar yaitu 59 persen, sedangkan sektor jasa seperti buruh pabrik, kuli angkut, pembantu rumah tangga, pedagang kecil, pelaut, menempati posisi kedua yang menyerap tenaga kerja dewasa 31,5 persen, dan posisi ketiga adalah sektor industri rumah tangga menyerap 8 persen tenaga kerja.²⁴

Bagi penduduk Kota Surabaya yang bekerja di sektor pertanian, posisi mereka sangat dipengaruhi oleh status tanah yang mereka olah. Sejak akhir abad ke-18 tanah-tanah di Kota Surabaya dan sekitarnya terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, tanah hak milik. Tanah ini dimiliki secara individual oleh penduduk setempat. Rata-rata kepemilikan mereka kecil dan hanya cukup untuk tempat mendirikan rumah serta tersisa sedikit untuk pekarangan. Tanah yang berstatus hak milik bebas terletak di seputar pusat kota. Kedua, tanah partikelir, yaitu tanah-tanah yang dijual oleh penguasa kolonial kepada para pengusaha. Tanah-tanah yang dijual tersebut umumnya adalah tanah yang berpenghuni sehingga status si penghuni adalah hamba sahaya dari tuan tanah pemilik tanah partikelir tersebut.²⁵ Ketiga, tanah-tanah perkebunan yang disewa oleh pemerintah dalam kerangka Sistem Tanam Paksa sejak tahun 1830. Pada masa Sistem Tanam Paksa, perkebunan pemerintah di Karesidenan Surabaya hanya terdapat di pinggiran Kota Surabaya, wilayah Kabupaten Surabaya, dan wilayah Kabupaten Mojokerto.²⁶

Perkebunan yang dikelola oleh pemerintah antara lain perkebunan kopi,

²³ P. Bleeker, "Fragmenten Eener Reis over Java, dalam *Tijdschrift van Nederlandsch-Indie*, Jilid I tahun 11, 1850

²⁴ J.J. Hageman, "Aanteekeningen nopens de industrie, handel en nijverheid van Soerabaja," dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie*, Nomor 5, Tahun 1859, hal. 137-152

²⁵ J. Heemstra, "Particuliere Landerijen in En Om Soerabaia," dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 29^e Jaargang 1940, hal. 48-62

²⁶ Bleeker, *op.cit.*, hal. 105

teh, tembakau, tebu, serta persawahan yang ditanami padi walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari seluruh jenis perkebunan, tebu menempati posisi teratas. Tanah di kawasan Surabaya dan sekitarnya yang berkontur landai sangat cocok untuk tanam penghasil gula tersebut. Sejak tahun 1840 produksi gula di beberapa pabrik yang terdapat di pinggiran Kota Surabaya cenderung terus menaik.

Pada awal abad ke-19 sebagian besar petani di pinggiran Kota Surabaya berada dalam penguasaan para tuan tanah partikelir.²⁷ Tuan tanah partikelir adalah para pengusaha yang diberi kesempatan untuk membeli tanah-tanah yang dijual oleh pemerintah kolonial dalam rangka mengumpulkan uang. Mereka dengan leluasa membeli tanah-tanah pertanian yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial. Menurut Heemstra penjualan tanah kepada pihak swasta di Kota Surabaya banyak dilakukan pada masa pemerintah Daendels dan Raffles antara tahun 1808-1813.²⁸

Penjualan tanah kepada pihak swasta membawa konsekuensi yang luar biasa berat terhadap penduduk yang tinggal di kampung-kampung di tanah yang dijual tersebut. *Pertama*, penduduk kehilangan haknya atas tanah tempat tinggal mereka dan tanah yang mereka garap sebagai mata pencaharian. Sejak tanah tersebut dijual kepada para tuan tanah maka tanah-tanah tersebut

sepenuhnya menjadi hak milik si pembeli. Penduduk yang tinggal di atas tanah itu berubah statusnya menjadi hamba-sahaya dari para tuan tanah. Ketika pada masa Raffles dilakukan rasionalisasi kepemilikan tanah, hak mereka atas tanah yang mereka tinggali dan mereka garap hilang. Hak atas tanah tersebut ada di tangan para tuan tanah. Status para penduduk yang tinggal di tanah partikelir adalah sebagai penyewa atau numpang. Konsekuensi *kedua*, sebagai hamba-sahaya mereka harus melakukan berbagai kewajiban yang ditunjukkan kepada para tuan tanah. Mereka harus mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tuan-tuan mereka. Status mereka berubah dari orang merdeka menjadi setengah budak.

Penderitaan para penghuni tanah partikelir amat berat karena para tuan tanah memiliki kekuasaan untuk memungut penghasilan dan pelayanan jasa dari penduduk yang tinggal di wilayah mereka. Dengan adanya kekuasaan yang tidak terbatas tersebut maka menurut W.H. van Ijseldijk dan N. Engelhard tanah partikelir untuk jangka pendek biasanya dihisap habis-habisan, tidak peduli apakah penduduknya rusak atau tidak.²⁹ Tuan tanah pemilik tanah partikelir ibarat raja-raja kecil di dalam sistem pemerintahan kolonial. Mereka memiliki hak *prerogative* atas tanah yang menjadi hak milik mereka beserta penduduk yang tinggal di atasnya.

²⁷ Pada tahun 1831 Pemerintah kolonial mengeluarkan *Gouvernement Besluit* No. 17 tanggal 11 Oktober 1831 yang kemudian diperbaiki dengan keputusan No. 15 tanggal 30 September 1835 yang menerangkan batas-batas Kota Surabaya. Batas-batas tersebut ditandai dengan dinding tembok dimulai pada jarak kurang lebih 300 langkah (*schreden*) dari tepi laut. Panjang dinding dari utara ke selatan ada 2.700 el atau sekitar 1.857 meter (1 el = 0.688 meter), sedang panjang dinding dari timur ke barat 1.850 el atau 1.272,8 meter. Dengan angka-angka tersebut maka sebenarnya yang disebut Kota Surabaya pada waktu itu hanya seluas sekitar 2,5 kilometer persegi. J. Hageman, *Soerabaja 1857 en Vroege*, M.S. KITLV, H.15

²⁸ J. Heemstra, "Particuliere Landerijen in en om Soerabaia," dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 29E Jaargang, 1940, hlm. 48-62. Namun menurut H. Th. Kal, pejabat *Controlir Binnenlandsch Bestuur* Kota Surabaya pada tahun 1906 munculnya tanah partikelir di Kota Surabaya sudah dimulai sejak masa Dirk van Hogendorp. Hogendorp menjual tanah di Gunungsari kepada Rothenbuhler, penguasa Jawa Pantai Timur pada tahun 1799. Di atas tanah itulah Rothenbuhler yang wafat pada tahun 1836 dimakamkan. Namun pada masa Daendels lah dilakukan penjualan tanah besar-besaran kepada pihak ketiga. H.Th. Kal, "Mededeelingen Over de Hoofdplaats Soerabaja," dalam *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur* (Een-en-dertigste Deel, 1906), hal. 390

²⁹ D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, (Jakarta: Pradnjaparamita, 1962), hal. 103-104

Mereka membebani para penghuni tanah mereka dengan kewajiban yang berat dan menekan. Akibatnya para penghuni tanah partikelir rata-rata hidup dalam kemiskinan. Penduduk yang tinggal di tanah partikelir ibarat telah diikat kakinya agar tidak bisa pergi dari tempat tinggal mereka. Dengan kondisi semacam itu maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara wajar.³⁰

Penduduk yang tinggal di tanah-tanah partikelir yang sebagian besar adalah para petani penggarap lahan milik tuan tanah adalah kelompok penduduk yang amat rentan dalam menghadapi berbagai perubahan di Kota Surabaya. Memasuki pertengahan abad ke-19 Surabaya memasuki periode perubahan besar-besaran. Kota semakin melebar yang dengan sendirinya mengekspansi kawasan pedesaan yang semula ada di pinggiran kota. Segala fasilitas yang dibutuhkan untuk melengkapi kota sebagian besar membutuhkan ruang. Ketika pemerintah membutuhkan ruang untuk pengembangan kota, salah satu usaha yang dilakukan adalah membeli kembali (*buy back*) atau tukar guling tanah-tanah partikelir. Sebagai contoh misalnya pada tahun 1855 pemerintah kolonial terpaksa membebaskan tanah-tanah partikelir di kawasan Wonokromo

karena di tanah tersebut akan dibangun kanal untuk memecah Sungai Brantas yang seringkali menyebabkan banjir di Kota Surabaya. Sebagai gantinya pemerintah memberikan tanah-tanah di Kawasan Dinoyo dengan sistem *tukar guling*. Proses pengalihan tanah tersebut tentu saja sangat merepotkan penduduk yang tinggal di Wonokromo tersebut. Mereka harus pindah ke tempat lain tanpa mendapat uang sepeser pun, baik dari tuan tanah maupun dari pemerintah.³¹

Namun perluasan Kota Surabaya lebih banyak karena disebabkan kebutuhan untuk pemukiman, penambahan fasilitas publik, serta untuk perluasan dan pemindahan kawasan industri. Pada awalnya perluasan kota ingin dilaksanakan dengan sistem radikal, yaitu dengan membangun rumah-rumah dan bangunan lain di sepanjang jalan utama yang mulai muncul setelah tahun 1870, seperti di Jalan Pasar Besar, Jalan Tunjungan, Jalan Kaliasin, Jalan Simpang, Jalan Embong Malang, Jl. Kedungdoro, dan Jalan Blauran. Di samping itu pembangunan juga dilakukan di tepi sungai Kali Mas, seperti di Genteng, Ketabang Kali, dan Kayoon.³² Tetapi dalam perkembangannya tanah-tanah di sepanjang jalan dan tepi sungai tidak mencukupi karena kebutuhan

³⁰ Beberapa status dan kewajiban penghuni tanah partikelir di wilayah sekitar Surabaya adalah sebagai berikut: Di Gunungsari orang bisa mengenal *gogol ageng* disamping *gogol alit*. Yang disebut pertama adalah pemilik rumah dan pekarangan, dan yang terakhir adalah sebagai *wong penumpang* lain. Keduanya membayar sewa pekarangan kepada pemilik tanah. Di tanah Karah, Ketintang, orang mengenal *gogol ageng*, yaitu pemilik pekarangan, yang dibebaskan dari beban bayar sewa pekarangan, meskipun mereka memperoleh hak untuk menanam tanah pertanian dengan padi, mereka tetap harus berperan serta melakukan *heerendienst* (kerja wajib) dalam bentuk menanam tebu, jika kebetulan tanah itu untuk penanaman tebu. Mereka adalah petani, mereka menerima kewajiban sebagai ganti dari kerja di pertanian, seperti kerja wajib dan menyerahkan sebagian dari hasil padi setelah dikurangi *bawon*. Disamping *gogol ageng*, orang juga mengenal *gogol sewan*. Mereka membayar sejumlah tertentu untuk sewa pekarangan, sebagai imbalan mereka memiliki hak untuk tinggal di pekarangan. Jumlah yang dibayarkan tergantung pada lokasi dan luas pekarangan, lewat ini mereka dibebaskan dari tugas kerja wajib (*heerendienst*), sepanjang itu berkaitan dengan penanaman tebu. Jadi, mereka harus melakukan kerja wajib lainnya seperti *cawis-diensten* dan *bandul-diensten*. Status yang melekat pada penduduk yang tinggal di tanah-tanah partikelir secara tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan mereka. Hal itu disebabkan karena status yang melekat tentu saja membawa konsekuensi terhadap kewajiban yang harus mereka pikul terhadap para tuan tanah yang memiliki kekuasaan tidak terbatas di tanah-tanah yang telah menjadi hak mereka. Kal, *op.cit.*, hal. 54

³¹ *Ibid.*, hal. 395

³² Faber, 1931, *op.cit.*, hal. 45

perumahan dan fasilitas lain juga sangat tinggi. Hal ini menandai bahwa Kota Surabaya sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tanah-tanah baru akhirnya harus dibuka untuk kebutuhan fasilitas kota. Kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para tuan tanah pemilik tanah partikelir. Banyak dari mereka akhirnya mendirikan biro pembangunan (*developer*), membangun rumah-rumah yang dijual atau disewakan kepada pemukim Eropa.

Kawasan pertama yang dikembangkan menjadi kawasan pemukiman adalah tanah partikelir di Keputran Lor. Tanah ini pada awalnya milik P. Janssens, pengelola pelabuhan Surabaya, yang dibeli seharga 4.000 *rijksdaalders*. Pada tahun 1888 tanah ini dibeli oleh *Bouwmaatschapij Keputran* (Perusahaan Pembangunan Keputran).³³ Pada awal abad ke-20 perusahaan tersebut kemudian membangun rumah-rumah untuk disewakan dan dijual kepada para pendatang dari Eropa. Karena proses penjualannya kurang lancar, akhirnya tanah seluas seratus hektar tersebut dijual per kavling. Dengan sistem seperti itu dalam sekejap

lahan yang semula merupakan lahan pertanian, pemukiman penduduk bumiputra, dan tanah kosong tersebut laris terjual. Dalam waktu tidak lebih dari enam tahun kawasan yang kemudian dikenal dengan nama *Palmenlaan* sudah terbangun. Pada lingkungan pemukiman Eropa tersebut dibangun taman yang diberi nama *Scheepmaker Park* yang merupakan bagian dari gaya masyarakat Eropa di negara jajahan pada waktu itu. Ketika Kota Surabaya ditetapkan sebagai *gemeente* pada tahun 1906, kawasan *Palmenlaan* sudah menjadi kawasan elit dan menjadi batas paling selatan Kota Surabaya.³⁴

Pengembangan kawasan *Palmenlaan* merupakan proses lebih lanjut dari berkembangnya salah satu inti (*nuclei*) dalam konteks teori inti berganda (*multiple nuclei theory*) yang dikembangkan oleh Harris dan Ullman, yaitu kawasan Simpang dan kawasan Tunjungan.³⁵ Kawasan Simpang kemudian menjadi stimulus berkembangnya kawasan lainnya, yaitu kawasan Darmo dan Gubeng yang juga dikembangkan menjadi kawasan pemukiman,³⁶ serta kawasan Ngagel yang dikembangkan menjadi kawasan

³³ Tillema, *op.cit.*, hal. 925

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pada saat Dirk van Hogendorp menjabat sebagai penguasa Jawa bagian Timur (Gezegeber van den Oosthoek) dan berkedudukan di Kota Surabaya (1794-1798) ia membangun sebuah rumah taman yang besar di kawasan Simpang di tepi Sungai Kali Mas dengan biaya yang amat besar yaitu sekitar 14.000 *ringgit*. Oleh Daendels rumah tersebut kemudian diperbaiki dan menjadi tempat resmi kediaman Residen Surabaya. Ketika pada tahun 1928 berdiri Propinsi Jawa Timur, rumah tersebut kemudian dijadikan tempat kediaman resmi Gubernur Jawa Timur. Kawasan Simpang yang semula merupakan kawasan terbuka yang relatif masih kosong secara perlahan-lahan berkembang menjadi pusat pertumbuhan Kota Surabaya di bagian selatan. Pada tahun 1808 di kawasan ini dibangun rumah sakit militer yang terletak di sebelah timur rumah taman. Faber, *op.cit.*, hal. 28

³⁶ Kawasan Darmo yang berada di sebelah selatan *Palmenlaan* dikembangkan menjadi pemukiman elit untuk orang-orang Eropa. Kawasan ini mulai dibangun pada tahun 1916 dan menjadi satu-satunya kawasan di Kota Surabaya yang dikembangkan berdasarkan perencanaan dari seorang planolog dan arsitek yaitu Ir. Henri MacLaine Pont. G.H. von Faber, *Nieuw Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's Voornaamste Kooptad in de eerste Kwarteeuw Sedert Hare Instelling 1906-1931*, (Surabaya: N.V. Boekhandel en Drukkerij, 1934), Bagian 1 "De Stadsuitbreiding".

industri.³⁷

Contoh di atas adalah sebagian kecil dari proses ekspansi kota ke kawasan yang semula merupakan kawasan pedesaan. Proses perluasan kota yang pada gilirannya menciptakan proses urbanisasi di kawasan sub-urban dan *rural* membawa konsekuensi yang besar baik secara estetika maupun secara sosial. *Pertama*, pengembangan kawasan pinggiran kota yang sebagian besar merupakan kawasan pertanian dan pemukiman penduduk bumiputra telah menciptakan suasana yang amat kontras. Ketika gedung-gedung dibangun maka pada saat yang bersamaan rumah-rumah penduduk bumiputra yang rata-rata berprofesi sebagai petani tetap bertahan pada bentuknya yang semula, yaitu rumah-rumah beratapkan daun ilalang, berdinding anyaman bambu atau bahan lain apa adanya, serta bertiang kayu dan atau bambu pula. Dengan kondisi seperti itu maka Kota Surabaya tumbuh menjadi kota yang indah pada bagian tertentu tetapi kumuh pada bagian yang lain. Kondisi ini telah memunculkan kalimat sindiran yang diungkapkan oleh warga Belanda penghuni kota itu bahwa: *Surabaya van buiten blink, van binen stink* yang maksudnya adalah bahwa Surabaya hanya terlihat indah pada bagian luarnya saja yaitu pada jalan-jalan utamanya saja, tetapi pada saat yang bersamaan di balik bangunan yang indah tersebut terdapat perkampungan kumuh yang dihuni oleh warga bumiputra.

Kedua, pengembangan kota yang banyak menggusur ladang-ladang dan sawah-sawah yang semula merupakan bagian dari mata pencaharian penduduk pribumi telah menciptakan pengangguran baru bagi para penggarap lahan tersebut. Penduduk yang telah kehilangan mata pencahariannya sebagian akhirnya tidak memiliki pekerjaan atau tetap menjadi petani penggarap di tanah-tanah partikelir tetapi dengan luas lahan yang digarap yang semakin sempit. Akibatnya kemiskinan tetap bertahan di kawasan tersebut bahkan sebagian semakin menjadi-jadi. Kedua hal tersebut, yaitu kemiskinan dan pemukiman miskin pada akhirnya menyatu menjadi bagian dari perkembangan Kota Surabaya selanjutnya.

Sejak Kota Surabaya berkembang menjadi kota besar memang banyak peluang untuk mencari pekerjaan, namun tidak semua kesempatan bisa didapatkan oleh warga kota. Banyak alasan mengapa banyak warga kota yang tidak mau memanfaatkan kesempatan tersebut. *Pertama*, banyak pekerjaan memerlukan keahlian dan persyaratan khusus terutama syarat pendidikan. Pekerjaan yang memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu terutama pekerjaan di kantor *gemeente*. Sejak Kota Surabaya ditetapkan sebagai *gemeente* pada tahun 1906, kantor *gemeente* membutuhkan banyak tenaga kerja. Lowongan tenaga kerja di kantor *gemeente* bisa dimasuki oleh siapa saja tanpa memandang latar

³⁷ Kawasan tersebut dibeli oleh pihak Gemeente Surabaya pada tanggal 16 Oktober 1916 dengan akta pembelian tertanggal 20 Maret 1917. Pembelinya adalah *Burgemeester* (walikota) Surabaya, Mr. A. Meyroos. Harga keseluruhan tanah tersebut adalah 850.000 *gulden* yang dibayar kontan. Oleh pihak *gemeente* sebagian tanah tersebut dijual kembali kepada *N.V. Machinefabriek Braat*. Tanah yang dijual kepada pabrik mesin tersebut seluas 150.000 meter persegi seharga 150.000 *gulden*, jadi satu *gulden* per meter persegi. Pada tahun 1920 *N.V. Machinefabriek Braat* mulai membangun pabriknya di kawasan ini. Lihat, N.V. Braat, 1901-1921 *N.V. Machinefabriek Braat*, (Surabaya: TP, 1921), hal. 5. Setelah pabrik mesin Braat membangun pabriknya di Ngagel, berturut-turut di kawasan tersebut dibangun beberapa pabrik lain, yaitu *N.V. Constructiewerkplaats Noordijk*, *N.V. Constructiewerkplaats Bakker*, *N.V. Smederij en Gieterij de Vulcaan*, dan *Constructie Werkplaats Eijfel*. Lihat, *Koster Algemeen Adressboek voor Soerabaja 1928*, (Surabaya: J.W.F. Sluyter, 1928), hal. 50. Tidak semua tanah di Ngagel yang dibeli oleh *gemeente* dipergunakan untuk pabrik. Di bagian timur pabrik dibangun pula kawasan perumahan untuk pekerja industri Ngagel. Pada tanggal 30 Mei 1924 pihak *gemeente* memberikan sebagian tanah di kawasan ini kepada perusahaan kereta api secara cuma-cuma agar dipergunakan untuk keperluan industri perkeretaapian. Faber, 1934, op.cit., hal. 240-256

belakang etnis, kecuali untuk posisi tertentu yang menghendaki jabatan tersebut dijabat oleh orang Belanda. Pada tahun 1930 jumlah penduduk bumiputra Kota Surabaya yang bekerja di kantor *gemeente* serta di kantor-kantor dinas yang berada di bawah *gemeente* sebanyak 511 orang. Jumlah tersebut belum termasuk yang bekerja di bagian kebersihan kota (*stadsreiniging*) yang jumlahnya mencapai 968 orang, serta pejabat politik yang bekerja di *gemeenteraad* sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat tersebut yang jumlahnya delapan orang.³⁸ Jika angka-angka tersebut dijumlahkan maka jumlah pegawai bumiputra yang bekerja di *gemeente* sebanyak 1.487 orang. Namun pekerjaan di kantor *gemeente* rata-rata memerlukan orang yang pernah sekolah minimal pernah menempuh jenjang pendidikan yang paling rendah.³⁹ Persyaratan tersebut telah membuat sebagian besar penduduk yang tinggal di kampung-kampung di Kota Surabaya tidak memungkinkan untuk mengakses pekerjaan di *gemeente* karena mereka rata-rata tidak berpendidikan. Dalam rapat *gemeenteraad* pada bulan Februari 1941 diketahui bahwa penduduk bumiputra Kota Surabaya yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah di kota tersebut hanya 7 persen dari seluruh jumlah penduduk.⁴⁰ Pekerjaan sebagai buruh pabrik di berbagai pabrik yang banyak berdiri di Kota Surabaya pada awal abad ke-20 juga sebagian menuntut tenaga yang berpendidikan. Dengan syarat ini maka hanya orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah-

sekolah umum sajalah yang bisa mengakses.

Kedua, perkembangan Kota Surabaya menjadi kota industri juga telah menawarkan beragam pekerjaan kasar terutama di pelabuhan. Namun banyak penduduk asli Surabaya yang tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar sehingga peluang menjadi buruh angkut di pelabuhan diambilalih oleh para pendatang. Pada tahun 1927 sekitar sepuluh ribu buruh angkut harian di pelabuhan Tanjung Perak berasal dari Madura.

E. Penutup

Perubahan ekologi dari pedesaan menjadi ekologi perkotaan membawa konsekuensi sosial yang besar bagi penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Ketika pedesaan sebagai basis mata pencaharian penduduk yang berprofesi sebagai petani berubah menjadi perkotaan, di mana tanah-tanah pertanian diakuisisi, maka pada saat itu sebagian area untuk mencari makan hilang. Hilangnya tanah-tanah pertanian telah menyebabkan sebagian masyarakat yang semula tinggal di kawasan pertanian kehilangan mata pencahariannya. Hal tersebut telah menciptakan perubahan sosial ekonomi yang drastis. Perubahan yang amat drastis tersebut telah sangat dirasakan oleh golongan bumiputra. Berubahnya ekologi desa menjadi ekologi kota tanpa diikuti dengan perilaku untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru telah menciptakan kompleksitas di Kota Surabaya, terutama pada sektor permukiman. Ketika kawasan Surabaya

³⁸ Angka-angka tersebut dijumlahkan dari nama-nama pegawai *Gemeente* Surabaya yang tercantum dalam *Verslag van den Toestand der Gemeente Soerabaja over 1930*, hal. 46-69, 256

³⁹ William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 66

⁴⁰ *Notulen en Gemeentebladen van de Openbare Vergadering van den Stadsgemeenteraad van Soerabaja Gehouden op 5 Februari 1941*, hal. 239

berubah menjadi kota metropolis yang berkembang pesat, pada saat yang sama masih terdapat kawasan pemukiman yang masih berorientasi pada masa lalu, yaitu pemukiman bumiputra yang disebut kampung. Kampung adalah pemukiman bumiputra yang masih memiliki corak budaya agraris yang sangat kuat.

Daftar Pustaka

- Albrecht, J.E. *Soerat Ketrangan dari pada Hal Keadaan Bangsa Tjina di Negri Hindia Olanda*. Batavia: Albrecht & Rusche, 1890
- Bleeker, P. "Fragmenten Eener Reis over Java. dalam *Tijdschrift van Nederlandsch-Indie*, Jilid I tahun 11, 1850
- Burger, D.H. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Pradnjaparamita, 1962
- Dagverhaal van eene reis door den Oosthoek van Java in het Jaar 1825 door den heer N. Van Meeteren Brouwer* (tanpa tempat dan tanpa tahun). Koleksi KITLV, Leiden
- Danandjaja, James. *Foklore Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Grafitipers, 1986
- Dick, H.W. *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000*. Athens: Ohio University Press, 2002
- Faber, G.H. Von. *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's eerste Koopstad van de Oudste tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad* (1906). Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1931
- Faber, G.H. Von. *Nieuw Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's Voornaamste Koopstad in de eerste Kwarteeuw Sedert Hare Instelling 1906-1931*. Surabaya: N.V. Boekhandel en Drukkerij, 1934
- Frederick, William H. *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: Gramedia, 1989
- Hageman, J. J. *Oostelijk Java en Madoera II*. prgf. 108. Koleksi KITLV, Leiden
- Hageman, J.J. *Soerabaja 1857 en Vroeger*. M.S. Koleksi KITLV, H.15
- Hageman, J.J. "Aanteekeningen nopens de industrie, handel en nijverheid van Soerabaja," dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie*, Nomor 5, Tahun 1859
- Harris, C.D. dan F.L. Ullman. "The Nature of Cities." dalam *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Volume 242, 1945
- Heemstra, J. "Particuliere Landerijen in En Om Soerabaia." dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 29^e Jaargang 1940
- Kal, H.Th. "Mededeelingen Over de Hoofdplaats Soerabaja." dalam *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur*, Een-en-dertigste Deel, 1906

- Lombard, Denys. *Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia, 2000
- Mumford, Lewis. *The Culture of Cities*. New York: Harcourt Brace, 1938
- Notulen en Gemeentebleden van de Openbare Vergadering van den Stadsgemeenteraad van Soerabaja Gehouden op 5 Februari 1941*
- Purnawan Basundoro. "Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-1940." *Tesis* Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 1999
- Purnawan Basundoro. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak, 2009
- Salmon, Claudine. "The Han Family of East Java: Entrepreneurship and Politics (18th 19th Centuries)", *Archipel* 41, 1991
- Subbag Humas dan Protokol Kotamadya Surabaya. *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*. Surabaya: Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya, 1980
- Tillema, H. F. *Kromoblanda: Over het Vraagstuk van 'het Wonen' in Kromo's Grote Land*, 6 Jilid. 's-Gravenhage: Uden Masman, De Atlas dan Adi Peostoko, 1915-23
- Verslag van den Toestand der Gemeente Soerabaja over 1930*